

KONFLIK ANTARA SOPIR TRANS PADANG DAN SOPIR ANGKOT

¹Hamdi Derita, ²Husni Halim, ³Dea Anand, ⁴Difa Ghassani, ⁵Tengku Niken Fachira, ⁶Dewi Anggraini, ⁷Doni Hendrik

^{1,2,3,4,5,6 &7} Ilmu Politik, Universitas Andalas

Email:

¹hamdiderita9@gmail.com,

²husnialim31@gmail.com,

³dea203458@gmail.com,

⁴dfghssni@gmail.com

Abstrak

Terjadinya konflik akibat benturan kepentingan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Sebab setiap individu memiliki rasionalitas yang berbeda-beda serta pentingnya masing-masing dalam kehidupan. Meskipun begitu, setiap konflik yang terjadi tentunya memerlukan penyelesaian atau resolusi. Hal ini menjadi penting, sebab setiap konflik yang dibiarkan tanpa adanya penyelesaian, berotenti mengakibatkan masalah yang lebih besar dan dapat merugikan banyak pihak. Hal ini pula yang berlaku dalam dinamika konflik antar sopir angkot dengan operator bus Trans Padang beberapa waktu lalu. Penelitian ini berjudul "Konflik Antara Sopir Trans Padang Dan Sopir Angkot". Analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang konflik pada dasarnya disebabkan oleh persoalan mis-komunikasi serta terdapat beberapa aktor yang dilibatkan dalam konflik maupun pada penyelesaian atau resolusinya. Dimana setiap aktor memiliki peran masing-masing.

Kata Kunci: Bus Trans Padang; Konflik; Sopir Angkot; Konsensus; Aktor.

Abstract

The occurrence of conflicts due to conflicts of interest is commonplace in the socio-political life of society. Because every individual has different rationality and importance in life. Even so, every conflict that occurs certainly requires a settlement or resolution. This is important, because any conflict that is left without a resolution, has the potential to cause bigger problems and can be detrimental to many parties. This also applies to the dynamics of conflict between public transportation drivers and Trans Padang bus operators some time ago. This research is entitled "Conflict Between Trans Padang Drivers and Angkot Drivers". Analysis of data collection in this study using a qualitative approach, with descriptive analysis. The results of the research show that the background of the conflict is basically caused by the problem of mis-communication and there are several actors involved in the conflict as well as in its settlement or resolution. Where each actor has their own role.

Keywords: Trans Padang Bus; Conflict; Angkot Driver; Consensus; Actor

PENDAHULUAN

Bus Transpadang merupakan angkutan alternatif masyarakat yang beroperasi di Kota Padang sejak bulan Januari 2014. Bus Tranpadang juga merupakan bagian dari penerapan progam BRT (Bus Rapid Transit) oleh Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi) di Kota Padang. Bus Trans Padang dikelola oleh PT Trans Padang. Bus Trans Padang dilengkapi dengan AC, beroperasi setiap hari pada pukul 06.00-20.00 WIB. Kapasitas penumpang Trans Padang adalah 20 orang penumpang duduk dan 20 orang penumpang berdiri dengan pegangan tangan dan dilengkapi sarana tempat duduk prioritas untuk penumpang ibu hamil, penumpang dengan anak, lanjut usia, serta penumpang berkebutuhan khusus. Karcis bisa dibeli di halte dengan tarif sebesar Rp 1.500 untuk pelajar dan Rp 3.500 untuk umum untuk satu kali perjalanan (flat) jauh maupun dekat.

Bus Transpadang Koridor VI merupakan angkutan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Padang dengan Trayek Pasar Raya-Kampus Unand. Peluncuran Bus ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota,

Dinas Perhubungan Kota Padang, dan Angkutan Umum sepanjang jalur Pasar Raya-Kampus Unand. Awal pengoperasian Transpadang Koridor VI berjalan tanpa masalah dan mendapat respon positif dari mahasiswa yang menggunakan jasa angkutan umum. Akan tetapi, seiring berlangsungnya pengoperasian Transpadang tersebut terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dinilai menyalahi kesepakatan oleh para supir angkot. Pihak angkot menilai bahwa halte-halte yang ditetapkan melalui perjanjian antara Transpadang dan Angkot telah dilanggar oleh Transpadang. Selain halte, supir angkot juga mengeluhkan fisik dari bus Transpadang yang besar menyebabkan kemacetan karena kondisi jalan yang sempit dan harus berdesak-desakan di jam sibuk.

Selanjutnya, keluhan para supir angkot adalah menurunnya pendapatan karena kehadiran transpadang dan menurunnya kesejahteraan supir angkot setelah diluncurkannya bus ini. Sehingga para supir angkot melakukan blokir jalan di depan BRI Corporate Pasar Baru Unand Kecamatan Pauh sebagai tuntutan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Transpadang Koridor VI. Sejak

diberlakukannya bus Transpadang di wilayah Universitas Andalas membuat angkutan kota (angkot) merasa dirugikan. Sebab, bus Transpadang dinilai mengambil penumpang angkot dan bus Transpadang dinilai lebih murah dalam penetapan ongkos. Hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara sopir angkot dengan bus Transpadang. Sopir angkot telah melakukan demo beberapa kali untuk menuntut agar bus Transpadang berhenti beroperasi di wilayah Universitas Andalas. Sopir angkot juga sering melakukan mogok kerja dan menurunkan paksa penumpang bus Transpadang.

Analisis Konflik

Jika menggunakan alat analisis Konflik, konflik antara sopir angkot dan bus transpadang ini dapat di analisis dengan menggunakan alat analisis Konflik "teori segitiga konflik (sikap, perilaku, dan kontradiksi). Dalam analisis konflik terkait teori segitiga konflik yang di dalamnya terdapat sikap, perilaku dan yang puncaknya merupakan suatu konfrontasi konflik. Dimana dalam segitiga konflik kita dapat melihat bahwa dalam sebuah konflik yang tidak simetris terlihat bawasannya konradiksi ditentukan oleh pihak yang bertikai, hubungan merkea, dan benturan

kepentingan intern antara mereka. Adapun sikap yang dimaksud dalam hal ini adalah persepsi dari pihak yang bertikai.

Dalam konflik yang terjadi antara para sopir angkot dan bus Trans Padang ini terkait dengan teori segitiga konflik adalah terkait suatu kebijakan pemerintah dalam menambahkan koridor 6 Trans Padang yang tujuan Unand, yang dianggap merugikan para sopir angkutan umum.

Keberadaan bus Trans Padang Koridor 6 (enam) inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya suatu aksi kekesalan para angkutan umum. Aksi yang dilakukan oleh supir angkutan umum ini tidak hanya sekali. Ini berlangsung 3 kali. Aksi pertama dan kedua para supir angkutan umum memutuskan untuk berhenti beroperasi dan menurunkan para penumpang di Trans Padang, serta memberhentikan Trans Padang untuk beroperasi. Dan demo yang terakhir yang terjadi tanggal 13 Maret para supir angkutan umum meluapkan kekecewaan nya dengan mengambil sikap berupa demonstrasi di gedung DPRD. Para sopir angkutan umum meluapkan kekecewaan atas kebijakan pemerintah terkait adanya koridor 6 di Kota Padang.

Selanjutnya, kasus antara sopir angkot dan Bus Trans Padang ini dapat dianalisis dengan menggunakan alat analisis Analogi Bawang Bombay". Teori analisis bawang Bombay adalah salah satu cara untuk menganalisis perbedaan pandangan yang terkait dari konflik dari pihak-pihak yang berkonflik dan memahami berbagai kebutuhan dari masing-masing pihak. Tak hanya itu, kelompok peneliti melihat konflik antara sopir angkutan umum dan Bus Trans Padang dapat dianalisis juga menggunakan teori Analogi Bawang Bombay.

Hal ini dapat dilihat adanya perbedaan pandangan terkait pihak yang berkonflik. Dimana dalam aksi demo angkutan umum, mereka meluapkan kekecewaan dengan menutup akses, dan yang terakhir demonstrasi ke gedung DPRD Kota Padang. Dimana dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan diantara berbagai pihak yang terlibat.

Dalam konflik ini, bus Trans Padang hanyalah menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Dan juga pemerintah dalam hal ini memberikan kebijakan terkait penambahan dari koridor 6 tujuan Unand ini. Karena untuk

mempertimbangkan Trans Padang sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan suatu moda transportasi yang nyaman untuk masyarakat.

Namun, disisi lain para sopir angkutan umum merasa dirugikan atas adanya Koridor 6 ini, tidak hanya menurunkan pendapatan para sopir angkutan umum, karena harga yang terjangkau sehingga mematikan harga angkutan umum. Kebijakan terkait penambahan koridor 6 Trans Padang inilah yang menjadi suatu puncak aksi yang dilakukan oleh para sopir angkutan umum. Dimana dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan atas pihak yang terkait. Namun, untuk tuntutan dari para angkutan umum sudah ditampung dan ketua DPRD Kota Padang meminta para sopir angkutan umum untuk membuat surat tuntutan dan mengirimkan surat tuntutan agar nantinya dapat ditindak lanjuti.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dimana Moleong mengatakan, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek, misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain. Dan

dideskripsikan dalam bentuk kata-kata serta bahasa, dengan memanfaatkan metode alamiah. Kemudian penulisan artikel ini juga menggunakan tipe pendekatan studi literatur atau studi pustaka sebagai sumber data.

Dimana menurut Zed, studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penulisan artikel ini didominasi dengan penggunaan data sekunder. Menurut Samsu, data sekunder ialah data yang telah lebih dahulu diperoleh dari sumber lain, atau juga dapat dipahami sebagai data yang diperoleh dari sumber kedua. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang telah tersedia sebelumnya dan kemudian di pilah untuk dijadikan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Support/Dukungan

Konflik yang terjadi antara sopir angkot dan bus Trans Padang pada dasarnya ditengarai oleh tiga faktor. Dimana faktor-faktor tersebut juga menjadi tuntutan para sopir angkot yang disampaikan dalam aksinya.

Dikutip dari media KOMPAS pada tanggal 16 Februari 2023, disampaikan setidaknya tiga tuntutan oleh Sopir Angkot yang bernama Pak Man (48) antara lain

“Sesuaikan plang rambu-rambu, mobil trans padang jangan masuk pasar, dan sesuaikan harga sewa angkot dengan trans padang”

Lebih jelasnya terkait dengan tuntutan penyesuaian plang atau rambu-rambu tersebut dilatarbelakangi oleh bus Trans Padang yang dinilai oleh sopir angkot telah melebihi ketentuan plang/rambu-rambu untuk berhenti menurunkan dan menaikkan penumpang. Hal ini juga disampaikan oleh Herman Zen selaku ketua ORGANDA Padang dalam diskusi pada dialog detak Sumbar dengan tema Kisruh Angkot VS Bus Trans Padang pada Selasa, 14 Maret 2023 atau tepat sehari setelah aksi demonstrasi terakhir yang dilakukan oleh para sopir angkot.

Dalam dialog yang secara live disiarkan oleh Chanel You Tube Padang TV tersebut Herman Zen mengatakan bahwa aksi tersebut sebetulnya juga merupakan persoalan mis-komunikasi. Dimana Herman menyampaikan bahwa; Kisruh atau riak yang terjadi ini karena adik-adik kita sopir angkot ini tidak

mendapatkan cerita yang utuh, sehingga berkambang dan lagi ditangkap oleh orang yang tidak tau persoalan dan menambah bumbu ini. Sehingga adik kita sopir merasa terpancing dengan hal tersebut.

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa konflik yang terjadi juga disebabkan oleh adanya komunikasi yang kurang terjalin dengan baik. Sehingga timbul hal-hal yang mengundang emosi dan membuat sopir angkot terprovokasi. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak hanya timbul dari masalah kesalahpahaman dari pihak sopir angkot. Dimana dalam hal ini persoalan mis-komunikasi ternyata juga terjadi dari pihak trans padang dengan Dinas Perhubungan Kota Padang. Dimana dalam persoalan kisruh antara sopir angkot dengan trans padang ini, memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh sopir trans padang terkait dengan aturan titik pemberhentian untuk kemudian menaikan dan menurunkan penumpang.

Sehinga aksi mogok dan protes yang dilakukan oleh sopir angkot jurusan Kampus Universitas Andalas, Limau Manis- Pasar Raya ini tidak semata-mata timbul dari kesalahpahaman dari pihak

sopir angkot saja, melainkan terdapat kesalahpahaman dari kedua belah pihak "ngebut"an dan tidak satu atau dua kali menyebabkan kecelakaan membuat para penumpang jadi tidak nyaman.

Aktor Konflik dan Perannya

Didalam permasalahan kasus kasus angkot dengan bus trans padang ini disebabkan karena berkurangnya penghasilan yang didapatkan oleh sopir angkot jurusan limau manis kampus unand yang dimana bahwasanya semenjak adanya bus trans padang banyak penompang menggunakan bus tersebut dari pada angkot dengan hal tersebut para sopir angkot melakukan aksi demo dan menghalangin bus trans padang untuk lewat. Hal ini terdapat aktor konflik dan peranya sebagai berikut:

1. Sopir angkot bekerja sebagai pembawa angkot untuk mahasiswa dan masyarakat.
2. Mahasiswa dan masyarakat sebagai penumpang dalam penggunaan angkot dan bus trans padang.
3. DPRD sebagai Mediator dalam penyelesaian konflik.
4. Kepolisian sebagai pihak pengamanan sekaligus mediator

5. Dinas Perhubungan Kota Padang Mediator sekaligus penentu rute trans padang untuk umum untuk satu kali perjalanan (flat) jauh maupun dekat.
6. Bus trans padang sebagai pembawa penumpang baik itu mahasiswa kampus atau masyarakat.

Tahapan Penahapan Konflik

Pra Konflik

Bus Transpadang merupakan angkutan alternatif masyarakat yang beroperasi di Kota Padang sejak bulan Januari 2014. Bus Tranpadang juga merupakan bagian dari penerapan progam BRT (Bus Rapid Transit) oleh Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi) di Kota Padang. Bus Trans Padang dikelola oleh PT Trans Padang. Bus Trans Padang dilengkapi dengan AC, beroperasi setiap hari pada pukul 06.00-20.00 WIB. Kapasitas penumpang Trans Padang adalah 20 orang penumpang duduk dan 20 orang penumpang berdiri dengan pegangan tangan dan dilengkapi sarana tempat duduk prioritas untuk penumpang ibu hamil, penumpang dengan anak, lanjut usia, serta penumpang berkebutuhan khusus. Karcis bisa dibeli di halte dengan tarif sebesar Rp 1.500 untuk pelajar dan Rp 3.500

2. Konfrontasi

Bus Transpadang Koridor VI merupakan angkutan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Padang dengan Trayek Pasar Raya-Kampus Unand. Peluncuran Bus ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota, Dinas Perhubungan Kota Padang, dan Angkutan Umum sepanjang jalur Pasar Raya-Kampus Unand. Awal pengoperasian Transpadang Koridor VI berjalan tanpa masalah dan mendapat respon positif dari mahasiswa yang menggunakan jasa angkutan umum. Akan tetapi, seiring berlangsungnya pengoperasian Transpadang tersebut terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dinilai menyalahi aturan oleh para supir angkot.

3. Krisis

Pihak angkot menilai bahwa halte-halte yang ditetapkan melalui perjanjian antara Transpadang dan Angkot telah dilanggar oleh Transpadang. Selain halte, supir angkot juga mengeluhkan fisik dari bus Transpadang yang besar menyebabkan kemacetan karena kondisi jalan yang sempit dan harus berdesak-desakan di jam sibuk.

4. Akibat

Para supir angkot melakukan blokir jalan di depan BRI Corporate Pasar Baru Unand Kecamatan Pauh sebagai tuntutan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Transpadang Koridor VI. Sejak diberlakukannya bus Transpadang di wilayah Universitas Andalas membuat angkutan kota (angkot) merasa dirugikan. Sebab, bus Transpadang dinilai mengambil penumpang angkot dan bus Transpadang dinilai lebih murah dalam penetapan ongkos. Hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara sopir angkot dengan bus Transpadang. Sopir angkot telah melakukan demo beberapa kali untuk menuntut agar bus Transpadang berhenti beroperasi di wilayah Universitas Andalas. Sopir angkot juga sering melakukan mogok kerja dan menurunkan paksa penumpang bus Transpadang.

5. Pasca Konflik

Akhir dari konflik antara sopir angkot dan transpadang adalah dilakukan pertemuan antara perwakilan sopir angkot dan pihak transpadang yang diadakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Padang.

Unsur Konflik

Dalam permasalahan kasus yang dilihat diteliti terdapat beberapa unsur konflik yaitu yang dimana actor, objek sangketa, dan situasi.

Actor

Dalam kasus yang diteliti terdapat beberapa actor yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu: sopir angkot, sopir bus trans padang, pengguna trans portasi umum, pemerintah kota padang. Actor tersebut yang terlibat dalam kasus trans padang dengan sopir angkot yang tujuan kampus unand.

Objek sangketa

Terdapat beberapa permasalahan yang dilihat dari kasus tersebut yang dimana bahwa sopir angkot tujuan kampus unand mengatakan bahwa dengan adanya trans padang mata pencarian para sopir angkot mulai berkurang dan juga terdapat bahwa trans padang tidak mematuhi aturan yang dimana biasanya trans berhenti di halte tempat pemberhentian yang telah dibuat oleh pemerintah namun sebaliknya sopir trans padang berhenti tidak sesuai dengan tempat pemberhentian yang telah dibuat. dengan hal tersebut para sopir angkot tujuan unand tersebut melakukan kasi demo dan menghalang trans padang

untuk lewat dan terjadilah macet sepanjang jalan, Dan juga pemerintah juga menegaskan untuk tidak melakukan aksi tersebut, dan pemerintah akan melakukan pencegahan terhadap trans padang yang tidak memenuhi aturan tersebut agar trans padang bisa berhenti tempat pemberhentian atau depan halte yang telah dibuat.

Situasi

Jika dilihat dari segi penglihatan bahwa pada saat itu situasi dijalan dekat pasar baru sendik terjadi macet yang dilakukan oleh sopir angkot. Namun pemerintah tidak tinggal diam dan akhirnya pemerintah memberikan suatu ketentuan dengan tidak membiarkan trans padan untuk berhenti sesuak hati dalam menaiki penompang agar para penumpang sopir angkot tidak kehabisan atau hilang. Dan sampai sekarang masih merasa aman sejak dilakukanya pemberitahuan tersebut.

Dinamika Konflik

Pada tanggal 19 Desember 2022 Bus Trans Padang koridor VI rute Pasar Raya-Kampus Unand resmi beroperasi. Pada saat itu diadakan peluncuran angkutan massal bus raya yang dihadiri oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa, di Auditorium Universitas Andalas. Hendri Septa mewakili Pemerintah Kota Padang

menyampaikan rasa syukur atas mulai beroperasinya bus Trans Padang koridor VI tersebut. Ia juga mengatakan beroperasinya bus Trans Padang koridor dapat memaksimalkan pelayanan transportasi publik di Kota Padang. Ia menambahkan bahwa pembukaan koridor VI tersebut merupakan bagian dari 11 program unggulan (progul) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode 2019-2024.

Dirut Perumda PSM, Rico Rahmadian Albert, mengatakan bahwa Bus Trans Padang koridor VI ini akan tersedia 10 bus dengan tipe "low deck" yang beroperasi pada pukul 06.00-19.00 WIB. Bus tersebut telah difasilitasi dengan teknologi modren seperti bus tracking, driver monitoring system, passenger counting censor, dan automatic doors. Ia menambahkan bahwa masyarakat yang ingin menaiki bus Trans Padang tersebut dapat menggunakan Kartu Brizzi yang bisa dibeli di berbagai agen BRILINK yang telah disediakan di sepanjang jalur koridor VI. Penumpang dewasa dikenakan tarif Rp3.500, sedangkan anak-anak RP1.500.

Pada 16 Februari 2023, puluhan sopir angkot rute Pasar Raya-Kampus Unand melakukan aksi demo. Para sopir

angkot tersebut memarkirkan angkot mereka di tepi jalan dekat halte BRI Pasar Baru. Kemudian mereka menghentikan Trans Padang yang ingin melintas menuju Pasar Raya. Mereka juga duduk di jalan agar bus Trans Padang tidak bisa melintas untuk beberapa saat. Mereka berteriak agar penumpang bus Trans Padang tersebut turun. Salah seorang sopir, Ilham, mengatakan bahwa sejak bus Trans Padang beroperasi dengan rute Kampus Unand, pendapatan mereka mengalami penurunan.

Pak Man yang merupakan sopir angkot menyatakan ada tiga tuntutan terhadap demo saat itu, yaitu melakukan penyesuaian terhadap plang rambu-rambu, bus Trans Padang tidak boleh masuk ke kawasan pasar, dan melakukan standarisasi harga sewa angkot dengan bus Trans Padang. Ia mengatakan bahwa bus Trans Padang melebihi plang rambu-rambu untuk berhenti, menurunkan, serta menaikkan penumpang. Selanjutnya, Kapolsek Pauh, AKP Muzhendri mengatakan bahwa aksi demo saat itu terkait dengan dugaan bus Trans Padang menambah plang pemberhentian.

Pada 13 Maret 2023, Sopir angkot rute Pasar Raya-Kampus Unand menggelar aksi demonstrasi di DPRD Kota Padang. Mereka menuntut bus Trans Padang koridor VI menurunkan penumpangnya di 34 halte di sepanjang rute tersebut. Para sopir angkot juga menuntut agar tidak dilakukan penambahan bus Trans Padang koridor VI tersebut. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa bus Trans Padang tidak boleh memasuki wilayah Pasar Raya karena mereka menganggap bahwa bus Trans Padang merugikan para sopir angkot. Mereka juga menuntut agar pengelola bus Trans Padang untuk melakukan restrukturisasi plang pemberhentian bus.

Ketua DPRD Kota Padang, Syahrial Kani menyambut para peserta demo dan menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Padang. Ia mengatakan bahwa telah ada kesepakatan antara sopir angkot rute Pasar Raya-Kampus Unand dengan pihak bus Trans Padang. Ia juga menegaskan bahwa apabila pihak Trans Padang melakukan penambahan titik pemberhentian dan tidak sesuai dengan

konsep awal, maka titik pemberhentian tersebut harus dibongkar.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Syani mengatakan bahwa Dinas Perhubungan akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk melihat titik pemberhentian yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Ia mengatakan bahwa apabila titik pemberhentian tersebut tidak sesuai maka akan dilakukan pembongkaran serta ia memiliki SK penempatan titik pemberhentian bus Trans Padang.

Manajemen Konflik

Armansyafrudin (2018) menjelaskan bahwasannya manajemen adalah suatu ilmu untuk mengatur atau memengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam manajemen juga dikenal dengan suatu istilah mengatur dalam pelaksanaan melalui suatu proses perencanaan sesuai dengan urutan yang telah dibuat untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Berdasarkan pada defenisi manajemen tersebut dapat dijelaskan bahwasannya manajemen merupakan suatu ilmu dalam mengatur suatu proses perencanaan untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal.

Adapun konflik sendiri berasal dari kata *confligere*, *conflictum* (saling

bertentangan) dimana dalam hal ini dapat berarti semua bentuk benturan, tanjakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan. Konflik ini sendiri memiliki banyak defenisi menurut para ahli, salah satu konflik menurut para ahli adalah konflik menurut Wirawan, dimana konflik dijelaskan sebagai suatu proses pertentangan yang diekspresikan diantara pihak atau lebih yang saling tergantung terkait dengan suatu objek konflik, menggunakan suatu pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan suatu keluaran konflik.

Melihat kepada dua defenisi tersebut manajemen konflik dapat diartikan sebagai suatu proses oleh pihak yang terlibat dalam konflik atau pihak ketiga dalam menyusun suatu strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan suatu konflik agar menghasilkan suatu relsolusi yang diinginkan. Hal ini juga dapat dilihat bahwasannya manajemen konflik dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pengendali konflik dalam mengatur dan memengaruhi pihak yang berkonflik untuk mencapai suatu tujuan penyelesaian konflik.

Wirawan menjelaskan bahwasannya dalam suatu manajemen konflik ini sendiri terdapat beberapa kunci yang perlu diperhatikan.

Pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang terlibat dalam konflik berupaya untuk mengelola konflik untuk menciptakan suatu solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kemudian juga terdapat pihak ketiga dimana dalam manajemen konflik ini yang bermaksud sebagai mediasi dalam suatu manajemen konflik. Pihak ketiga ini biasanya terdapat dari kalangan organisasi atau perusahaan, dimana dalam hal ini pihak yang terlibat konflik menjadi anggota atau pegawainya.

Strategi Konflik

Manajemen konflik juga terdapat di dalamnya terkait dengan suatu strategi konflik, dimana strategi konflik ini sendiri merupakan suatu proses penyusunan strategi konflik sebagai rencana untuk mengelola konflik. Jika suatu konflik ini tidak dikendalikan maka konflik dapat berkembang menjadi suatu konflik yang destruktif. Dimana dalam hal ini masing-masing pihak tidak memfokuskan kepada suatu

penyelesaian yang akan menguntungkan satu sama lain, tetapi menjadi suatu konflik yang dapat merusak dan menghancurkan masing-masing pihak yang terlibat konflik.

Mengendalikan Konflik

Manajemen konflik juga di dalamnya merupakan suatu aktivitas dalam mengendalikan dan mengubah konflik untuk kemudian menciptakan suatu konflik yang menguntungkan. Dalam hal ini mengendalikan konflik bertujuan untuk mengarahkan konflik dari konflik yang destruktif kepada konflik konstruktif. Dimana konflik konstruktif sendiri nantinya akan mengembangkan suatu kreativitas dan inovasi bagi pihak yang terlibat konflik untuk menciptakan suatu win-win solution.

Resolusi Konflik

Dalam hal ini manajemen konflik juga bertujuan untuk menciptakan suatu solusi konflik yang menguntungkan.

Kemampuan Beradaptasi

Jika dilihat dari konflik maka adaptasi dapat mempertahankan eksistensinya, atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniyah, dan dapat mengadakan

relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial.

Menurut Mustafa Fahmi (dalam Desmita) pengertian luas tentang proses penyesuaian terbentuk sesuai dengan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya, yang dituntut dari individu tidak hanya mengubah kelakuannya dalam menghadapi kebutuhan kebutuhan dirinya dari dalam dan keadaan di luar, dalam lingkungan di mana dia hidup, akan tetapi juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan adanya orang lain dan macam-macam kegiatan mereka. Jika mereka ingin penyesuain, maka hal itu menuntut adanya penyesuain antara keinginan masing-masingnya dengan suasana lingkungan sosial tempat mereka bekerja. Seperti konflik sopir angkot tujuan kampus unand dengan sopir bus trans padang tersebut.

Menurut Baum dalam Desmita tingkah laku penyesuaian diri diawali dengan stres, yaitu suatu keadaan di mana lingkungan mengancam atau membahayakan keberadaan atau kesejahteraan atau kenyamanan diri seseorang. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kemampuan beradaptasi adalah kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, baik dari

dalam diri maupun dari lingkungan sehingga terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan. Adaptasi adalah suatu penyesuain pribadi terhadap lingkungan. Penyesuain ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi. Adaptasi itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk setiap melangsungkan kehidupan.

Maka dengan beradaptasi suatu konflik seharusnya sopir angkot juga bisa melihat diri sendiri dengan apa yg menyebabkan penumpang pindah menggunakan bus trans padang, karena ada yg mengatakan bahwa sopir angkot suka ugal-ugalan dalam membawa angkot sehingga ada penumpang yg terbentur hingga hampir jatuh, dan juga sopir angkot lama dalam mengantarkan penumpang ketujuan karena menunggu angkot hingga penuh. Dan juga untuk sopir bus trans padang juga harus menyesuaikan diri dengan tidak melakukan pemberhentian sembarangan karena hal tersebut dapat memicu terhadap pencarian sopir angkot.

Memfokuskan kepada tujuan

Terkait dengan kasus yang diangkat terkait dengan konflik transportasi umum yang mana dilakukannya suatu demonstrasi oleh sopir angkot "lurus" terhadap trans Padang menuju Unand. Terkait dengan manajemen konflik yang di dalamnya terdapat beberapa hal penting seperti pihak ketiga dan pihak yang saling berkonflik untuk mencapai suatu tujuan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam kasus demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan angkot Trans Padang ini sendiri dengan bus Trans Padang jurusan Unand, para sopir angkutan umum jurusan unand sendiri melakukan demonstrasi karena semenjak adanya bus Trans Padang jurusan Unand ini menyebabkan adanya penurunan dalam mendapatkan sewa. Tidak hanya itu, para sopir angkutan umum ini juga meminta untuk pengelolaan lagi terhadap halte bus Trans Padang jurusan Unand.

Untuk upaya dan pengelolaan konflik ini sendiri terdapat pihak ketiga yang membantu menemukan suatu solusi konflik yang kemudian dapat menjadi suatu solusi yang akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak ketiga yaitu

pemerintah, kepolisian, dan dishub angkutan kota Padang. Dalam hal ini pemerintah yaitu ketua DPRD kota Padang meminta perwakilan sopir angkutan umum untuk mengirimkan surat tuntutan agar kasus ini bisa ditindak lanjuti. Dan untuk permasalahan halte yang dipermasalahkan oleh para sopir angkutan umum kemudian kabis angkutan dishub mengatakan bahwasannya posisi halte sudah sesuai dengan standar jarak. Namun nantinya jika ini masih menjadi permasalahan, pihak ketiga yang terkait juga kepolisian akan meninjau langsung ke lapangan untuk melihat jumlah halte yang kemudian nantinya akan dicarikan solusi agar tidak adalagi permasalahan antara sopir angkutan umum jurusan Unand dengan bus Trans Padang Koridor 6 jurusan Unand ini.

Resolusi Konflik

Resolusi konflik sendiri merupakan suatu upaya dalam pengendalian konflik yang mana memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu konflik melalui pemecahan suatu masalah secara konstruktif. Secara umum suatu strategi dalam suatu penyelesaian konflik sebaiknya harus dimulai dengan suatu pengetahuan yang mencukupi

tentang konflik yang terjadi. Hal ini kemudian bermanfaat dalam menemukan suatu strategi resolusi konflik yang tepat dalam suatu permasalahan.

Strategi dalam suatu resolusi konflik sendiri juga dipengaruhi oleh negosiasi antara pihak yang terlibat dalam mendapatkan suatu solusi atas permasalahan yang mana solusi yang didapatkan nantinya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam suatu proses strategi resolusi konflik sangat dibutuhkan yang dinamakan mediasi. Mediasi sendiri merupakan suatu alternatif dalam penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan.

Di dalam kasus demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan sopir angkutan umum jurusan Unand dan Bus Trans Padang jurusan unand sendiri, terdapat pihak ketiga yang membantu dalam suatu proses penyelesaian konflik ini. Dimana dalam upaya penyelesaian konflik tersebut dikatakan bahwa terdapat beberapa pihak yang menjadi mediator, sebagaimana yang disampaikan oleh Yudi Indra Syani selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, yang dikutip dalam diskusi atau

Dialog Detak Sumbar. Yudi menyatakan bahwa

“Sebenarnya demo kemarin kan kita sudah difasilitasi oleh DPRD, pada waktu itu hadir langsung ketua DPRD, wakil ketua DPRD, kemudian juga ketua Komisi III dan sekretaris Kominsi III, kemudian juga ada dari perwakilan dari yang demo, kemudian kami dari Dinas Perhubungan melakukan pembahasan tentang tuntutan-tuntutan tersebut.”

Dalam hal ini mediasi dan pihak ketiga yang membantu adalah DPRD Kota Padang, Dishub Kota Padang, dan pihak terkait lainnya. sebagai upaya resolusi konflik atau upaya mencari solusi terkait dengan tuntutan serta permasalahan yang terjadi antara kedua elah pihak, Pihak mediator sebagaimana disebutkan di atas memerikan penjelasan serta pengarahan kepada pihak yang berkonflik. Sebagaimana penyampaian Yudi yang masih dikutip dari Live dalam dialog Detak Sumbar, ia menyampaikan:

“Dalam pembahasan itu sebenarnya sudah dijelaskan kepada perwakilan dari pengusaha dan sopir angkot, bahwa sebenarnya program trans padang ini adalah bukan menambah jumlah armada, melainkan

mengganti, karena 3 angkot diganti dengan 1 bus trans padang. Kemudian juga kita jelaskan mengenai halte serta perencanaannya mulai dari master plan nya, kemudian DED nya, sehingga sudah sesuai dengan perencanaan. Seperti itu kira-kira penyelesaiannya, kemudian kita ke lapangan ya, sama-sama kemudian sudah disepakati bahwa halte ini, kan yang dipermasalahkan jumlah halte yang tidak benar tan, tapikan kita punya dokumen, ya kita katakan bahwa halte yang sudah disampaikan oleh perwakilan itu kita ambil datanya. Dan dari pihak kepolisian mengatakan sesuai dengan kesepakatan rapat nanti ini akan disampaikan ke DPRD. Dan dibahas oleh DPRD serta Dishub dan kemudian di panggil lagi perwakilan pihak yang berkonflik untuk penyelesaian akhir”

Disisi lain, bersamaan dengan kepolisian ketua DPRD dan Dishub akan terjun langsung untuk melihat kondisi di lapangan. Terkait dengan tuntutan halte bus Trans Padang yang dinilai sopir angkutan umum tidak jelas, maka dari itu akan dilakukan observasi langsung oleh

pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Padang. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh pihak terkait, dinas perhubungan menyatakan bahwa titik halte atau plang penanda pemberhentian Bus Trans Padang sebetulnya sudah sesuai.

Akan tetapi terdapat kekeliruan atau mis-informasi dari pihak operator atau sopir trans padang. Dimana disebutkan bahwa peta titik pemberhentian yang menjadi acuan para sopir Bus trans padang ternyata tidak sesuai dengan yang si atur oleh Dinas Pehubungan Kota Padang. Sehingga terjadi jika kita simpulkan, sebetulnya permasalahan juga timbul atau dipicu dari mis informasi dari pihak bus trans padang mengenai titik pemberhentian.

Hal demikian disampaikan oleh KaDishub yakni Yudi dalam pembicaraan dengan presenter Padang TV dalam Live Dialog Detak Sumbar, dimana menurut Yudi terdapat acuan yang berbeda yang digunakan oleh sopir bus dalam menentukan titik pemberhentian, sebagaimana pemaparan Yudi selaku Kepala Dinas Perhungunan; Kemarin koridor enam ini, dia memegang ini, ada daftar halte tapi bukan dari Dushub, ndak tau dari mana, katanya dari grup

katanya. Haltenya tu tidak sesuai dengan data dari Dishub, dan mungkin itu yang membuat persoalan sebenarnya, karna ada yang dari mana datangnya nggak jelas gitu. Sedangkan kita kan SK nya ada. Itu mungkin salah satu lah yang membuat miskomunikasi.

Berdasarkan kerangan serta penjelasan di atas, maka dapat kita lihat upaya resolusi konflik yang dilakukan atas persialan kisruh antara sopir angkot VS bus trans padang ini sudah mendapatkan penanganan. Dimana para mediator seperti yang telah dijelaskan di atas telah memfasilitasi pihak yang berkonflik. Dimana dari hasil mediasi yang dilakukan terdapat kesalahan informasi serta miskomunikasi dari kedua belah pihak sehingga menimbulkan keributan antar keduanya. Pihak mediator juga memberikan pemahaman kepada masing-msing pihak yang berkonflik terkait dengan jtujuan dari kebijakan tersebut serta bagaimana sistem yang dipakai dala kebijakan tersebut.

Kasus ini sudah menemukan suatu solusi yang baik dimana saat ini sopir angkutan umum juga beroperasi seperti biasa begitu juga dengan Bua Trans Padang. Tidak ada lagi permasalahan di antara kedua pihak.

KESIMPULAN

Transportasi umum merupakan sarana yang amat penting agar mempermudah aktivitas masyarakat. Pemerintah sudah seharusnya memfasilitasi transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Transportasi umum seperti itu diharapkan agar masyarakat mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Berbagai kota di Indonesia telah mengadakan transportasi umum salah satunya adalah Kota Padang yang menghadirkan Bus Transpadang dan beroperasi sejak tahun 2014. Bus Transpadang dikelola oleh PT Trans Padang. Bus tersebut juga memiliki fasilitas yang nyaman, yaitu terdapat AC di dalamnya. Kemudian, bus tersebut juga menerapkan ongkos yang relatif murah bagi semua kalangan masyarakat Kota Padang sekitar Rp 1.500 bagi pelajar dan Rp 3.500 untuk umum.

Setelah membuka beberapa rute di Kota Padang, bus Transpadang membuka rute baru, yaitu Pasar Raya-Kampus Unand. Rute tersebut mendapatkan tanggaa positif dari mahasiswa yang sangat membutuhkan transportasi umum untuk melaksanakan kegiatan kampus. Namun, para sopir

angkot merasa bus Transpadang ini mengambil penumpang mereka dan mengalami penurunan pendapatan mereka. Kemudian, terjadi demo yang dilakukan oleh para sopir angkot yang meminta agar bus Transpadang tidak mengambil rute Kampus Unand. Solusi yang dapat diberikan agar tidak terjadinya bentrok antara sopir angkot dan bus Transpadang adalah dengan Bus Transpadang memiliki jadwal perjalanan yang tidak setiap waktu (misalnya setiap 10 atau 15 menit sekali) dan untuk para sopir angkot dapat melakukan perbaikan angkot agar lebih nyaman serta melatih sopir agar mengemudi dengan hati-hati dan tidak ugal-ugalan.

REFENSI

Dharmawan Arya Hadi, 2006, *Konflik Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)*, hlm. 11

Kusworo, 1958, *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*, Jatinogor, Alqaprint Jatinogor, hlm. 9

Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)*, Hal. 6

Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif,*

Kuantitatif Mixed Methods, serta Research & Development), Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), (2017), Hal. 95

Sudarmanto Eko, dkk, 2021, *Manajemen Konflik*, Yayasan Kita Menulis, hlm. 105.

Yudi Indra Syani selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, pada LIVE: Dialog Detak Sumbar Selengkapnya dapat diakses melalui link:

<https://youtube.com/live/5ufDP1bBBPg?feature=share9>.

Sumber dapat diakses melalui link:

<https://regional.kompas.com/read/2023/02/16/184333778/puluhan-sopir-angkot-lurus-demo-trans-padang-menuju-unand-penumpang-dipaksa?amp=1&page=2>.